

INOVASI PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTABARU

Hayatun Nufus¹ Normajatun² Fika Fibriyanita³

¹Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 17120035

²Ilmu Administrasi Publik, 63201, fisip, uniska, 1116116301

³Ilmu Administrasi Publik, 63201, fisip, uniska, 1121028803

*e-mail : hytnnfs@gmail.com

ABSTRACT

Hayatun Nufus, NPM. 17120035 “*Innovation of Public Service in The Issuance of Business License at the Office of Investment and Integrated Services One Door Kotabaru Regency*” Guidance of Mrs. Normajatun as The Main Supervisor and Mrs. Fika Fibriyanita as Co Mentor. The purpose of the research is to know the description of Innovation Of Business License Issuance Service in the Office of Investment and Integrated Services One Door Kotabaru Regency. The research method uses qualitative approach with descriptive research type. The data was collected with documentation and interviews to several informants. The sample is determined using purposive sampling technique. Data analysis uses data reduction, presentation of data and drawing conclusion. The results showed that the Innovation of Business License Issuance Service through the Online Single Submission (OSS) system has been very helpful for services to be effective and efficient in accordance with government regulations of electronically integrated services, but still has some inhibitory factors in the Innovation of Business License Issuance Services through the Online Single Submission (OSS) system.

Keywords : *Service Innovation, Issuance of License, Online Single Submission*

ABSTRAK

Hayatun Nufus, NPM. 17120035 “*Inovasi Pelayanan publik dalam Penerbitan Surat Izin Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru*” Bimbingan Ibu Normajatun sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Fika Fibriyanita sebagai Co Pembimbing. Tujuan penelitian agar mengetahui gambaran Inovasi Pelayanan Penerbitan Surat Izin Berusaha melalui karakteristik inovasi pada Dinas PMPTSP Kabupaten Kotabaru. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan dokumentasi dan wawancara kepada beberapa orang informan. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik sampling purposive. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi Pelayanan Penerbitan Surat Izin Berusaha melalui sistem (OSS) sudah sangat membantu pelayanan menjadi efektif dan efisien sesuai dengan peraturan pemerintah pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik, tetapi masih memiliki beberapa faktor penghambat dalam Inovasi Pelayanan Penerbitan Surat Izin Berusaha melalui sistem (OSS).

Kata Kunci : *Inovasi Pelayanan, Penerbitan Surat Izin, Online Single Submission*

PENDAHULUAN

Pelayanan Publik oleh Aparatur Sipil Negara yang menjadi isu strategis dalam melayani masyarakat karena pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek yang sangat luas, maka pemerintah mempunyai fungsi untuk memberikan berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan oleh rakyat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan para rakyat.

Izin Usaha dapat diartikan sebagai identitas usaha yang dijalankan adalah legal atau sah karena mendapatkan lisensi atau izin dari instansi pemerintah yang berwenang, (Robot, H. dkk. (2019. 1). Usaha yang berizin menjadi terjamin keamanan pelaku usaha dalam menjalankan usaha, oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah mempunyai strategi yang baik dan tepat dalam rangka pelayanan surat izin usaha.

Dinas (PMPTSP) Kabupaten Kotabaru adalah salah satu instansi yang bentuknya dalam upaya deregulasi dan debirokratisasi perizinan penanaman modal, berdasarkan Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Penyelenggaraan PTSP menyebutkan bahwa PTSP

merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan, proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian pelayanan melalui satu pintu, (Robby dkk. 2019, 52).

Pelayanan oleh Aparatur Sipil Negara di Dinas PMPTSP seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Kotabaru mengumumkan dalam *website* resminya seluruh pelayanan perizinan telah mengimplementasikan sistem baru yang dibuat oleh Peraturan Pemerintahan untuk sistem (OSS) pada tanggal 2 Agustus 2018, namun pelayanan tetap terbuka untuk memberi arahan kepada pihak atau pelaku usaha yang tidak mengerti ataupun kurang paham bagaimana menggunakan sistem OSS. Berdasarkan PP No. 24 Th. 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi dasar kebijakan adanya OSS.

Inovasi sistem digital OSS pada bidang pelayanan publik adalah sistem yang mengintegrasikan semua pelayanan perizinan usaha yang menjadi kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota dilakukan melalui elektronik. Inovasi telah mengungguli kompetitif yang penting karena memberi jalan bagi organisasi untuk memberikan layanan yang berbeda, inovasi menjadi hal yang penting dalam ranah pengembangan teknologi digital. Inovasi merupakan pengembangan produk baru dan perbaikan berkelanjutan yang diperlukan. Karena itu, menurut Paul Trott (dalam Witjara E. 2019. 312) ia mendefinisikan inovasi sebagai cara berfikir dan tindakan yang diperlukan untuk keberlanjutan dan keuntungan perusahaan. Inovasi melalui sistem digital merupakan upaya untuk meningkatkan *digital literacy* masyarakat yang sekaligus berimplikasi positif dalam peningkatan penggunaan pelayanan daring yang disediakan, (Irawan dkk. 2020, 136).

Penggunaan teknologi sistem digital adalah sebuah *alternatif* untuk melakukan inovasi birokrasi dan perbaikan pelayanan publik, karena kecenderungan perkembangan masyarakat dan perekonomiannya semakin berkembang oleh inovasi teknologi. Inovasi secara umum diartikan dalam konteks berubahnya perilaku, inovasi erat dengan lingkungan yang karakteristiknya dinamis serta berkembang, (Hamirul dkk. 2020. 2). Peraturan Kementerian pada tahun 2014 Nomor 30 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Kemenpan ANRB menerapkan kebijakan Inovasi Pelayanan Publik semua instansi pemerintah, pusat maupun daerah yang harap dapat membuat suatu inovasi terhadap cara kerja pelayanan publik. Pelaksanaan OSS diterbitkan untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung perkembangan usaha. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Dinas PMPTSP Kabupaten Kotabaru berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang adalah sebagai unsur pelaksana tugas pemerintahan dan pembangunan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Kotabaru. Di dalam Pelayanan, Dinas PMPTSP Kabupaten Kotabaru terdapat masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem OSS. Hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam hal inovasi digital sehingga pelayanan sistem OSS sebagai dasar klasifikasi bidang usaha untuk menerbitkan perizinan menjadi kurang siap untuk diintegrasikan dalam sistem OSS.

KAJIAN LITERATUR

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan ASN tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik Nomor 30 Tahun 2014 Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif orisinal atau adaptasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. OSS merupakan sistem pengintegrasian perizinan usaha secara elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah yang diharapkan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, sehingga perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Oleh karena itu dalam Inovasi Pelayanan Publik, Rogers dalam Hutagulung, S.S. (2018. 25-26) mengemukakan inovasi dapat digunakan dengan menggunakan 5 (lima) indikator atribut (karakteristik), yaitu :

1. Nilai lebih (relative advantage)
Pengguna inovasi dianggap memiliki tingkat keuntungan, suatu inovasi yang dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya atau mempunyai komponen yang sangat penting.
2. Kesesuaian dengan masalah (compatibility/ contextuality)

Agar inovasi lama tidak dibuang begitu saja karna jika suatu inovasi atau ide baru tertentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka inovasi itu tidak dapat diadopsi dengan mudah sebagaimana halnya inovasi yang sesuai.

3. Daya jangkau (complexity)
Dengan sifat yang baru maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan lebih tinggi dibandingkan inovasi sebelumnya pengguna inovasi juga akan menilai tingkat kesulitan atau daya jangkau yang akan dihadapinya jika mereka memanfaatkan inovai tersebut.
4. Kemudahan diamati (observability)
Inovasi harus dapat diamati bagaimana menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Semakin besar kesesuaian dan kemampuan diujo coba semakin kecil juga kerumitan, sehingga inovasi terpakai dengan cepat.
5. Bisa dicoba (triability)
Inovasi akan bisa diterima jika telah teruji mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan inovasi yang lama.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat menjadi dasar dan sumber dalam penyusunan proposal, Sugiyono (2013. 292). Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini diharap dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif, seperti hasil pengumpulan data, wawancara, studi literatur, studi eksisting, catatan lapangan, dan lain-lain.

Pada penelitian ini menggunakan metode Teknik pengumpulan data dengan metode riset yang dipilih, agar data bisa terkumpul. Data yang dikumpulkan memiliki peranan yang penting untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi pada kualitas pelayanan, yaitu :

1. Observasi
Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati.
2. Wawancara
Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:72) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan pikiran melalui tanya jawab sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data yng berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian misalnya dokumen yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, dan data pegawai lainnya, Sugiyono (2013:82).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Impelementasi Inovasi Pelayanan Penerbitan Surat Izin Berusaha pada Dinas PMPTSP Kabupaten Kotabaru

Inovasi Pelayanan dalam penerbitan Surat Izin Berusaha ini merupakan sistem (OSS) yang berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintahan nomor 24 Tahun 2018. Dengan menggunakan sistem OSS dalam penerbitan surat izin berusaha menjadi lebih mudah dalam membuat surat izin berusaha. Sistem OSS ini dapat diakses melalui website oss.go.id. Untuk mengakses laman OSS berikut proses cara kerja panduan membuat akun OSS yang penulis peroleh dari DPMPTSP Kabupaten Kotabaru :

1. Pembuatan dan Aktivasi Akun OSS



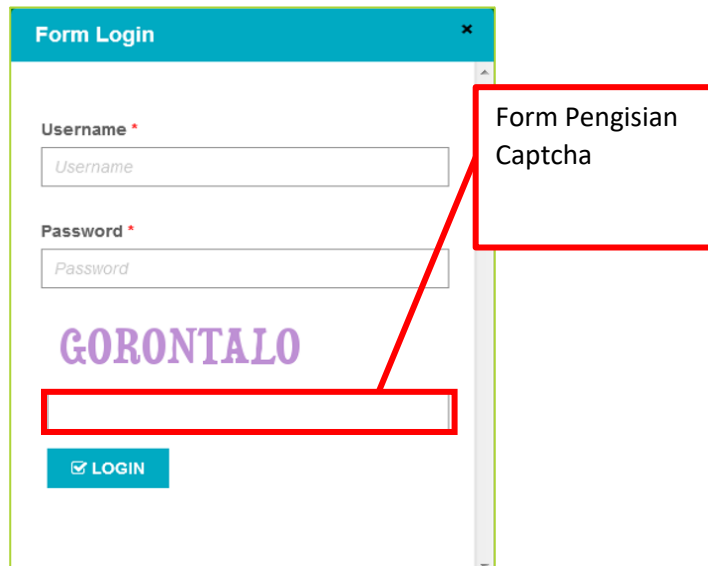
Gambar 1 Pembuatan dan Aktivasi Akun

2. Akses Portal OSS

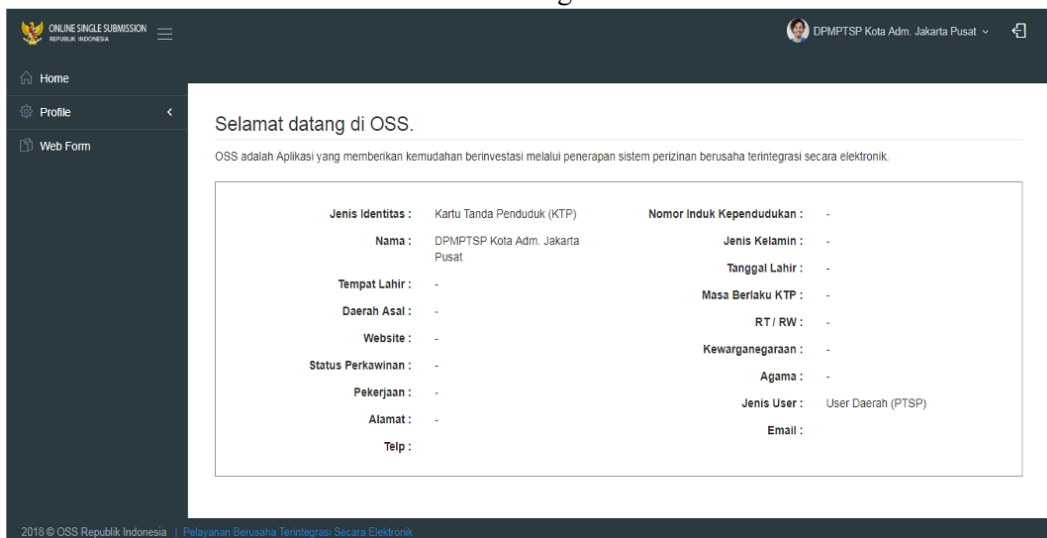


Gambar 2 Akses Portal *Online Single Submission*

3. Login

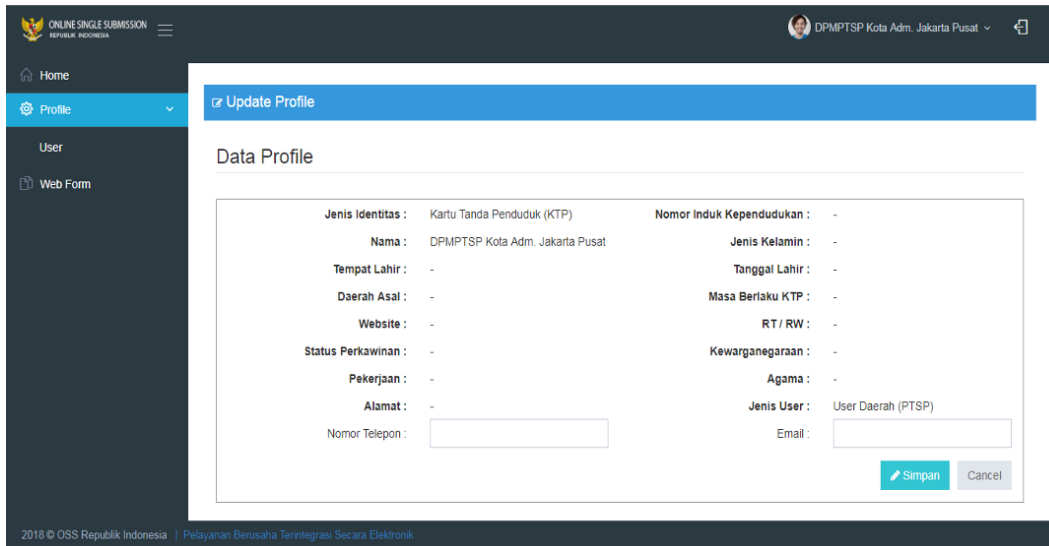


Gambar 3 Login Masuk Formulir



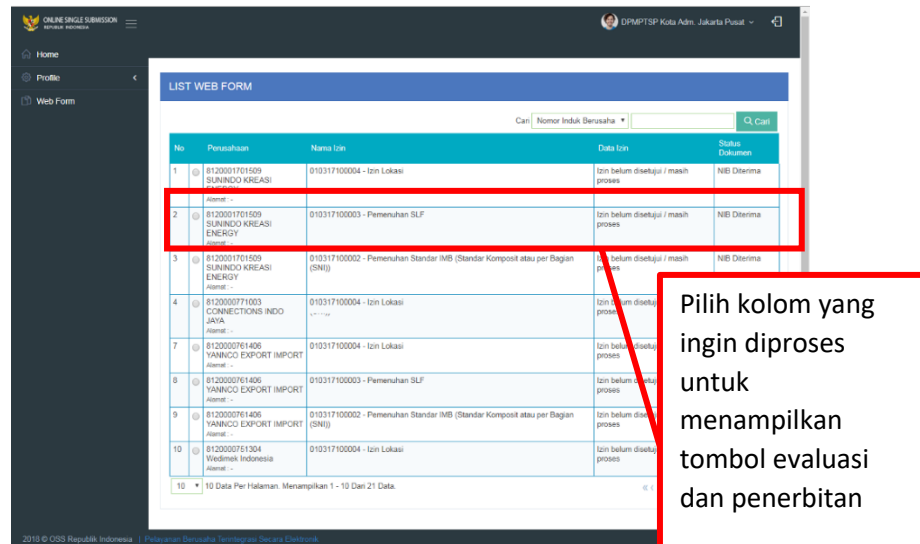
Gambar 4 Data Diri sesudah berhasil Login Masuk

4. Profile



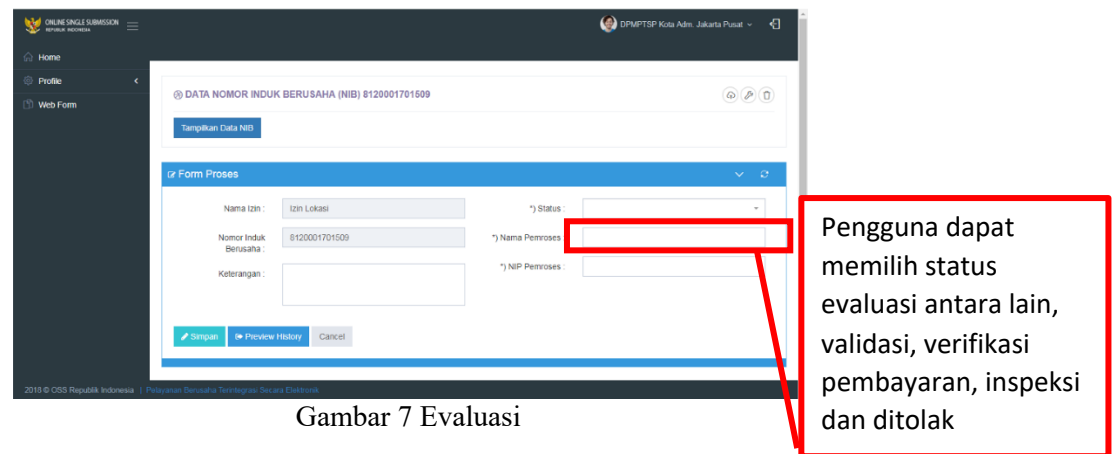
Gambar 5 Profile Data Diri

5. Webform

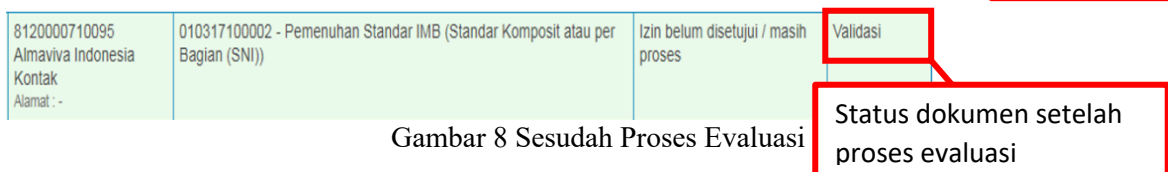


Gambar 6 Website Formulir Permohonan

6. Evaluasi

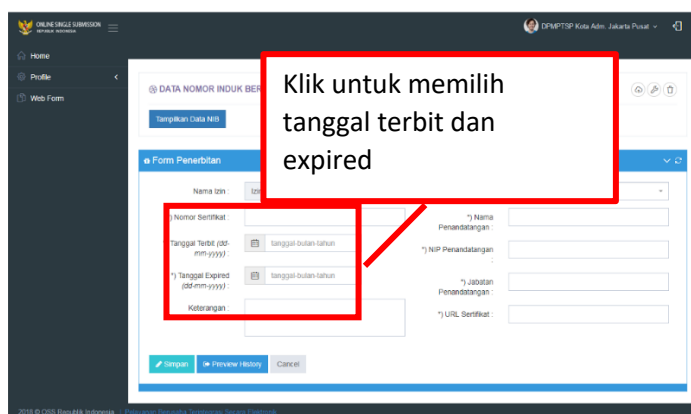


Gambar 7 Evaluasi



Gambar 8 Sesudah Proses Evaluasi

7. Penerbitan



Gambar 9 Penerbitan



Gambar 10 Proses Penerbitan Berhasil

2. Inovasi Pelayanan Penerbitan Surat Izin Berusaha Pada Dinas PMPTSP Kabupaten Kotabaru

Mengenai pelayanan secara terintegrasi melalui sistem *OSS (Online Single Submission)*. Inovasi pelayanan penerbitan Surat Izin Berusaha mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Secara Terintegrasi Secara Elektronik. DPMPSTP Kabupaten Kotabaru mulai memberlakukan peraturan pemerintah tersebut pada 2 agustus 2018, Inovasi pelayanan sistem *OSS* ini guna memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada seluruh pelaku usaha dalam penerbitan Surat Izin Berusaha secara terintegrasi.

Dalam Inovasi Pelayanan Publik, Rogers dalam Hutagulung, S.S. (2018. 25-26) mengemukakan inovasi dapat digunakan dengan menggunakan 5 (lima) indikator inovasi (karakteristik) yaitu Nilai Lebih (Relative Advantage), Kesesuaian Dengan Masalah (Compatibility), Daya Jangkau (Complexity), Kemudahan Diamati (Observability), Bisa Dicoba (Triability). Dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan karakteristik Inovasi Pelayanan Penerbitan Surat Izin Berusaha melalui Sistem *OSS* dalam hal Nilai Lebih (Relative Advantage) pada penelitian ini mencakup pada perubahan implementasi inovasi pelayanan penerbitan melalui sistem *OSS* yang mulanya manual dalam mengurus penerbitan surat izin berusaha yang sering kali banyak oknum atau pelaku usaha melakukan manipulasi izin dalam artian membuat satu surat tetapi Izin Berusahanya menjadi beranak-pinak, melalui Inovasi Pelayanan Penerbitan Surat Izin Berusaha melalui sistem *OSS* menjadikan pelayanan lebih mudah, cepat, efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya menjadikan pelayanan terintegrasi secara elektronik.

Dari Karakteristik pada Kesesuaian Dengan Masalah dalam penelitian ini sangat sesuai dengan perkembangan zaman, Inovasi Pelayanan Penerbitan Surat Izin Berusaha ini mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan yang manual, karena sama berproses mengeluarkan izin berusaha tetapi dalam lingkup waktu melalui *OSS* menjadi lebih cepat daripada yang manual. Dari hal tersebut kinerja dalam penerbitan surat izin berusaha menjadi lebih cepat, akurat dan detail.

Kemudian dari segi Daya Jangkau atau kerumitan dalam penelitian ini banyak pelaku usaha kesulitan dalam memahami cara kerja pelayanan berusaha terintegrasi melalui elektronik, kurangnya pemahaman mengenai Inovasi Pelayanan Penerbitan Surat Izin Berusaha melalui *OSS* menjadikan inovasi tidak mudah dimengerti dan digunakan oleh pelaku usaha sehingga pelayanan dilakukan pendampingan di Dinas PMPTSP Kabupaten Kotabaru.

Sedangkan dari karakteristik indikator kemudahan diamati pada penelitian ini dalam Inovasi Penerbitan Surat Izin Berusaha melalui *OSS* menghasilkan sesuatu yang lebih baik dikarenakan pelayanan menjadi mudah serta terintegrasi secara elektronik.

Dalam hal karakteristik Bisa dicoba dalam penelitian ini Inovasi Pelayanan Penerbitan Surat Izin Berusaha melalui sistem *OSS* telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan dibandingkan dengan inovasi yang lama terbukti dengan pelayanannya cepat, bisa melakukan secara mandiri dan data akurat. Oleh karena itu dalam segi izin ini merupakan izin yang sudah diakui oleh negara sehingga keluaran dari *OSS* ini secara aspek

sudah dijamin oleh negara karena izin dari kementerian secara langsung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dari hasil pembahasan penulis menarik kesimpulan bahwa dalam inovasi pelayanan penerbitan Surat Izin Berusaha melalui sistem *OSS* ini terdapat lima karakteristik atau indikator yaitu Nilai Lebih (Relative Advantage), Kesesuaian Dengan Masalah (Compability), Daya Jangkau (Complexity), Kemudahan Diamati (Observability), Bisa Dicoba (Triability). Maka dalam hal tersebut bahwa dalam inovasi pelayanan terdapat perubahan yang dulunya pada sistem manual memakan waktu yang lama dalam penerbitan surat izin berusaha sekarang melalui sistem *OSS* menjadi lebih mudah, akurat, efektif dan efisien.

Kesimpulan

Dalam hal ini hasil dari penelitian dapat disimpulkan dan diketahui bahwa :

1. Berdasarkan implementasi dan penggunaan Inovasi Pelayanan Penerbitan Surat Izin Berusaha melalui sistem *OSS* menjadi lebih mudah dalam mengurus penerbitan surat izin berusaha dan sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun banyak pelaku usaha kesulitan dalam memahami cara kerja bhnelayanan, serta kurangnya pemahaman mengenai Inovasi Pelayanan Penerbitan Surat Izin Berusaha melalui Online Single Submission. Inovasi ini sudah memenuhi beberapa karakteristik inovasi yaitu Nilai Lebih (Relative Advantage), Kesesuaian Dengan Masalah (Compability), Daya Jangkau (Complexity), Kemudahan Diamati (Observability), Bisa Dicoba (Triability).

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penulis memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Terus mengembangkan inovasi-inovasi baru khususnya dalam pelayanan penerbitan surat izin berusaha melalui sistem *OSS* seperti ada pembaharuan versi sistem aplikasi sehingga semakin mempermudah, mempercepat, efektif dan efisien pelaku usaha dalam mengolah surat izin berusaha.
2. Memperbaiki atau mempelajari hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses Inovasi Pelayanan Penerbitan Surat Izin Berusaha melalui sistem *OSS* khususnya pelaku usaha sehingga hambatan-hambatan dalam *OSS* ini bisa teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamirul., Pratiwi.W. 2020. *Inovasi Dalam Pelayanan Publik*. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Jawa Tengah: Pena Persada.
- Hutagulung, S.S., Dedy H. 2018. *Membangun Inovasi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Deepublish.
- Saggaf, Said., Said, M.M., Saggaf, W.S. 2018. *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang*. Cv Sah Media : Makassar
- Sisca., Simarmata, H.M.P., Purba, E.G.B., Dewi, I.K., Fajrilah, M.S., Sudarso, A., Sudarmanto, E. 2021. *Manajemen Inovasi*. Yayasan Kita Menulis
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Cv. Bandung
- Tim Fisip Uniska. *Panduan Penulisan Skripsi*. UNISKA. Banjarmasin
- Witjara, E. 2019. *Digital Business Valuation : Inovasi, Strategi, dan Tips*. Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo.

Jurnal

- Djamrut, D.E. 2015. *Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*. Jurnal Ilmu Pemerintahan
- Irawan, B., Nizar, M., Akbar, P., & Khanz, A. H. . 2020. *Inovasi Pelayanan Permohonan Pengajuan Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda*. Jurnal Inovasi Kebijakan.
- Junior, Marten Prasetyo. 2016. *Inovasi Pelayanan Publik (Studi Kasus Perizinan Penanaman Modal di BPPT Kota Semarang)*. *Journal of Political and Government Studies*
- Kurniawan, R.C. 2016. *Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan
- Nurmazidah, Irma. 2018. *Pengaruh Kinerja Pegawai dan Kualitas Pelayanan Administrasi Akademik Terhadap Kepuasan Mahasiswa (Studi Kasus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) UIN Walisongo Semarang*
- Pratama, M.R. 2013. *Inovasi Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Tentang Nilai Tambah (Value Added) Inovasi Pelayanan Perizinan Bagi Masyarakat di Kota Kediri*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara
- Putra, Rizvanda Meyliano Dharma. 2018. *Inovasi Pelayanan Publik di Era Disrupsi (Studi Tentang Keberlanjutan Inovasi E-Health di Kota Surabaya)*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara
- Robby U.B., Tarwini W., 2019. *Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS) : Studi pada Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi*. Jurnal Ilmiah Administasi Publik dan Pembangunan
- Robot, H., Ronny, G., Donald, M. 2019. *Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Surat Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jurnal Ilmu Pemerintahan
- Saputra, Denny. 2018. *Pengaruh kualitas pelayanan administrasi kepegawaian terhadap kepuasan pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Administrasi Publik
- Yusmanto, S., Hermansyah, E., Efendi, R., 2014. *Rancang Bangun Aplikasi Pengamanan Keaslian Surat Izin Tempat Usaha Menggunakan Algoritma Elgamal dan Secure Hash Algorithm 246 Studi Kasus : Badan Pelayanan Terpadu (BPPT) Kota Bengkulu*. Jurnal Rekrusif

Peraturan

- Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 56 Tahun 2017 struktur organisasi pelayanan perijinan ditingkatkan lagi menjadi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
- Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Inovasi Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik